

PENGARUH SIKAP MACHIAVELLIANISM DAN SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PERILAKU TAX AVOIDANCE YANG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK DI INDONESIA (JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR)

Aditya Santoso Gunawan, S.E., M.Ak.

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
aditya_santosoG@yahoo.com

Dr. Dedhy Sulistiawan, S.E., M.Sc., Ak., CA

Akuntansi/Fakultas Bisnis dan Ekonomika
dedhy@staff.ubaya.ac.id

INTISARI

Penelitian ini bertujuan mengkonfirmasi hipotesis dari peneliti, dimana faktor internal seperti *Machiavellianism* dan faktor eksternal seperti *social responsibility* diindikasikan memiliki signifikansi dari perilaku *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur dimana dari penelitian terdahulu di luar negeri terdapat fakta bahwa *social responsibility* dan *machiavellianism* cenderung memiliki korelasi negatif

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif dan termasuk ke dalam basic research, dimana penelitian ini berfungsi untuk menguji teori atas hipotesa yang telah dibuat peneliti mengenai bagaimana kaitan antara *social responsibility* dan *machiavellianism* dengan *tax avoidance* dimana penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisisioner

Dalam kehidupan sosial, adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, salah satunya perilaku mengenai Tax Avoidance. Faktor internal yaitu *Machiavellianism* dimana perilaku ini cenderung merugikan orang lain serta faktor eksternal yaitu *social responsibility* dimana perilaku ini cenderung terbentuk karena lingkungan sekitar.

Dari hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa semakin tinggi tingkat *Machiavellianism* maka semakin tinggi orang untuk melakukan *tax avoidance*, sedangkan semakin tinggi tingkat *social responsibility* maka seseorang cenderung untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini agak unik karena di Indonesia adanya ketidakpercayaan terhadap birokrasi pemerintahan yang cenderung korup membuat adanya kompensasi perilaku tanggung jawab sosial ke bidang lainnya selain pajak.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Machiavellianism, Social Responsibility*

ABSTRAK

This study aimed to confirm the hypothesis of the investigators, where internal factors such as Machiavellianism and factors external such as social responsibility is indicated memiliki significance of the behavior of tax avoidance which is carried out by the taxpayer, especially in Central Java and East Java,

where previous research abroad is a fact that social responsibility and Machiavellianism is likely to have a negative correlation

This study included in the quantitative research and included into basic research, where this research serves to test the theory on hypotheses that have been made research on how the link between social responsibility and machiavellianism with tax avoidance where the study was conducted by spreading questionnaire

In social life, their internal and external factors that influence a person's behavior, one's behavior on Tax Avoidance. Internal factors are Machiavellianism where this behavior is likely to harm others as well as external factors, namely social responsibility where this behavior tend to be formed due to the surrounding environment.

From the research, showed that the higher the level of Machiavellianism, the higher people to do tax avoidance, while the higher level of social responsibility, the person tends to make tax avoidance. It is somewhat unique because in Indonesia the distrust of corrupt government bureaucracy that tends to make their compensation socially responsible behavior to other fields in addition to taxes.

Keywords : *Tax Avoidance, Machiavellianism, Social Responcibility*

PENDAHULUAN

Tidak tercapainya penerimaan pajak pada tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 1060 triliun atau hanya sekitar 82% dari total target yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 1294 triliun disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya perlambatan ekonomi (Jefriando, 2016). Namun perlambatan ekonomi tidak serta merta menjadi salah satu faktor yang membuat penerimaan pajak menurun, faktor lain yang menjadi pengaruh adalah *tax avoidance*. Terbukti dengan dilakukannya *gizjeling* terhadap 2 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pabean Surabaya karena terbukti adanya tunggakan sebesar 2,99 miliar dan 900 juta namun keduanya tidak bisa melunasinya (Kharismawati, 2015).

Salah satu kasus besar dari Grup Asian Agri pada tahun 2013 dimana dalam persidangan terbukti bahwa pemilik dari Grup Asian Agri memang menggunakan kedudukannya untuk melakukan *Tax Avoidance* yang berujung pada *Tax Evasion* (Akuntanonline, 2013). Kerugian yang diderita negara akibat kasus dari Asian Agri mencapai 2,5 triliun rupiah (Beritasatu, 2013). Pada tahun 2015, Sukmawijaya (2015) dalam Temp.com, menyatakan bahwa menteri

Bambang Brodjonegoro meminta peran serta dari konsultan pajak perlu ditingkatkan dengan cara menolak klien yang bermasalah.

Selain itu, data yang dipublikasikan oleh *transparency national* di tahun 2015, peringkat Indonesia masih di angka 88. Hal tersebut masih tertinggal jauh dari Singapura (8) dan Malaysia (54). Dari fakta tersebut, tentunya dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih rawan dengan tindakan korupsi, dimana menurut survei yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2014, beberapa pejabat negara seperti Suryadharma Ali, Sultan Batoegana dan Hadi Purnomo telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang membelitnya.

Sebenarnya para pelaku kasus korupsi maupun tersangka lainnya tersebut jika dilihat dari sisi finansial bukan termasuk dalam ekonomi yang lemah, namun ada hal lain yang mendasari perbuatan tersebut. Robbins (2008) mengungkapkan bahwa sifat *machiavellianism* dan tipe kepribadian seseorang yang sering diwujudkan dengan tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi perilaku individu maupun organisasi.

Salah satu bidang yang sekarang sedang mendapatkan sorotan tajam dari pemerintahan Jokowi ialah pajak (Akhir, 2016). Berbagai cara dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi bahkan menghindari pembayaran pajak (Suandy, 2011). Alabede, dkk (2011) melakukan penelitian di Nigeria dan didapatkan hasil bahwa faktor penyebab dari wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* adalah faktor ekonomi dan preferensi risiko. Dimana *tax avoidance* sendiri, sering dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Dalam situasi yang memerlukan pertimbangan etika ketika mengambil keputusan, kerahasiaan data dari klien dan kemampuan teknikal dari konsultan pajak sangat mempengaruhi (Marshal, dkk, 2005). Permasalahan mengenai etika juga banyak disorot lewat penelitian yang dilakukan oleh Hansard (2005) di dalam Susan dan Frank (2015) yang mengungkapkan bahwa pendapatan pajak di Inggris pada tahun 2005 mendapat sorotan tajam, hal ini dikarenakan banyak perusahaan multinasional yang belum sepenuhnya memiliki transparansi dalam sisi akuntansi dan perpajakannya. Padahal menurut penelitian yang dilakukan oleh Matten dan Moon (2004) dikatakan bahwa tanggung jawab sosial baik individu

maupun korporasi ditentukan oleh beberapa faktor salah satunya adalah transparansi.

Sikka (2008) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa KAP *Big Four*, seperti Deloitte, PWC, EY dan KPMG memiliki peranan benefit yang besar di saat banyak perusahaan multinasional tengah disorot masalah pajak. Keterampilan, keahlian, pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan, etika serta tanggung jawab sosial dari tiap individu di dalam KAP menjadi faktor yang mutlak harus dijunjung tinggi. Selain itu, Gargalsan dan Lehman (2010) menyatakan bahwa perkembangan dan perubahan peraturan pajak yang semakin rumit dari waktu ke waktu membuat wajib pajak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pajak merasa kesulitan dan akhirnya meminta bantuan konsultan.

Pada realitanya, wajib pajak banyak memberikan tekanan kepada konsultan pajak agar pembayaran pajaknya dapat seminimal mungkin atau sesuai dengan kehendak dari wajib pajak yang bersangkutan (Nienaber, 2010). Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kepribadian dari masing-masing individu, dimana *machiavellianism* merupakan bagian dari kepribadian masing-masing individu (Holland, 1973).

Penelitian yang dilakukan oleh Shaffer dan Simmon (2006) menemukan fakta bahwa konsultan pajak yang sangat menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial sangat tidak setuju dengan kegiatan *tax avoidance*, sedangkan konsultan pajak yang memiliki sifat *machiavellianism* yang cenderung tinggi kurang memperdulikan kepatuhan dalam membayar pajak dan tanggung jawab sosial yang kurang.

Hasil penelitian dari Shaffer dan Simmon juga didukung dengan hasil dari penelitian Adriana (2014), bahwa *social responsibility* dan *machiavellianism* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku etis terdapat konsultan pajak, namun faktor situasional tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsultan pajak. Penelitian tersebut sedikit dimodifikasi dengan menambahkan faktor situasional seperti preferensi risiko, dominasi profesional dan hubungan profesional.

Kedua penelitian diatas dijelaskan kembali oleh Ludigdo (2007) dimana pengambilan putusan etis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal saja, namun faktor internal juga berpengaruh kuat. Sehingga dengan kata lain, studi ini menggunakan faktor internal yaitu *machiavelliansm* dan faktor eskternal yaitu *social responsibility* dimana kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan seseorang.

Namun dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dirasa masih kurang. Banyak diantaranya hanya meneliti mengenai sisi personal dari konsultan pajak saja namun tidak melihat latar belakang dari para konsultan pajak yang juga merupakan wajib pajak. Sehingga dalam hal ini, peneliti memasukkan mengukur kepatuhan daripada wajib pajak secara menyeluruh baik yang berprofesi sebagai konsultan pajak maupun lainnya dalam melakukan *tax avoidance*

KAJIAN TEORI

Social Responsibility

Banyak faktor yang dapat membentuk kepribadian manusia baik secara internal maupun secara eksternal. Faktor eksternal yang paling berperan dalam membentuk kepribadian manusia ialah lingkungan (Kaisser, dkk, 1999). Berbagai-bagai kepribadian dari tiap-tiap individu yang bercampur menjadi suatu di dalam lingkungan sosial, hal tersebut menimbulkan adanya suatu gesekan maupun kecocokan di antar tiap individu (Kruse, 1995).

Meskipun sering terjadi gesekan di dalam lingkungan sosial, namun tidak sedikit dari para individu yang memiliki kesadaran untuk mendamaikan suasana dan berusaha menciptakan agar situasi lingkungan sekitar menjadi nyaman dan kondusif (Abbot dan Monsen, 1978). Tidak adanya peraturan yang jelas mengenai bagaimana seharusnya peran individu di dalam lingkungan sekitar tidak membuat beberapa individu yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, karena pada dasarnya dalam melakukan tanggung jawab sosial sudah menjadi suatu kebiasaan dan kesadaran (Abbot dan Monsen, 1978)

Sehingga dari hal tersebut, peneliti memandang bahwa faktor tanggung jawab sosial layak untuk dimasukkan sebagai salah satu variabel di dalam penelitian ini. Menurut Kolk (2015), tanggung jawab sosial memiliki banyak makna tergantung dari individunya, namun yang pasti tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang namun tidak memiliki standar yang baku. *Social responsibility* merupakan suatu perbuatan namun antar satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tidak selalu sama (Votaw, 1973). Sehingga, *social responsibility* dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan sosial berguna dan memberikan manfaat bagi orang lain (Portney, 2008) dan tidak hanya semata-mata dilakukan untuk tujuan sukarela, namun banyak individu maupun perusahaan yang melakukan *social responsibility* dengan tujuan untuk meningkatkan profit, perlindungan hukum, meningkatkan dukungan sosial (Caroll, 1999). Dalam melakukan *social responsibility*, individu maupun perusahaan tidak dapat membedakan mana yang merupakan pangsa pasar mereka atau tidak, dikarenakan tidak adanya konseptual *framework* yang jelas mengenai *social responsibility* (Devinney, 2013).

Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur *Social Responsibility* adalah dengan menggunakan dasar *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1975.

Machiavellianism

Selain lingkungan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi individu, adanya faktor internal juga sangat berpengaruh terhadap perilaku dari individu di dalam kehidupan sosial (Kaisser, dkk, 1998). Dalam faktanya, setiap individu memiliki sikap *machiavellianism* yang melandasi perilaku seseorang terlepas apakah sikap *machiavellianism* nya tinggi atau rendah (Inancki, 2015).

Konsep pertama kali, diungkapkan oleh Nichollo Machiavelli (1469-1527) yang ditulis kembali oleh Inancki (2015), dimana *machiavellianism* sering dikaitkan dengan “*dark personality*” dan diartikan sebagai suatu perbuatan dari personal yang cenderung melakukan perbuatan curang, egois, sinis, acuh tak acuh, dingin dan tidak peduli dengan orang lain. Christie dan Gies (1970) meneliti

bahwa tinggi atau rendahnya sikap *machiavellianism* dari seseorang dapat diukur dengan melihat emosional dari seseorang dalam hubungan *interpersonal*.

Machiavellianism mulai berkembang di dalam manajemen suatu perusahaan yang meliputi; kepemimpinan, produktifitas dalam kerja sampai masalah politik di dalam suatu perusahaan (Dahling, dkk, 2009). Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *machiavellianism* mengakibatkan seorang pemimpin menjadi kurang mendukung dan kurang perhatian di dalam perusahaan (Drory dan Gluskinos, 1980).

Tax Avoidance

Teori ekonomi tradisional dikatakan bahwa manusia akan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan usaha seminimal mungkin, hal ini juga berlaku di dalam kewajiban manusia dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Cleary (2009), didapatkan hasil bahwa atas *revenue* yang dihasilkan oleh setiap individu, tiap-tiap dari individu memiliki kecenderungan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Pajak dalam hal ini merupakan salah satu cabang ilmu yang ingin diteliti karena pada realitanya di Indonesia bahwa pajak merupakan suatu hal yang wajib dan telah diatur di dalam undang-undang.

Sudah 12 tahun target-target pemerintah terhadap pajak tidak pernah tercapai, hal ini diakibatkan karena masih belum patuhnya para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di dalam negeri. (Nurhayat, 2014). Maka bagi para individu yang melanggar undang-undang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan akan dikenakan hukuman dan sanksi yang berlaku.

Stiglitz (1986) dalam jurnalnya yang berjudul *The General Theory of Tax Avoidance*, menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan perbuatan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajak. Ada beberapa elemen yang biasanya sering dijadikan area perhindaran oleh *tax payer*, yaitu : *income*, *expense*, *asset* dan kewajiban. Pajak bukan merupakan suatu perbuatan sukarela dan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku (Newman, 1947). Pada kenyataannya, mayoritas para wajib pajak cenderung berusaha meminimalkan pajak dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengikuti standar-standar yang berlaku tanpa melanggar peraturan (Logue's, 2006).

Pemerintah harus membuat suatu badan yang mengawasi kegiatan perpajakan bahkan merevisi undang – undang perpajakan sehingga dapat meminimalkan praktek *tax avoidance*.

Hubungan Machiavellianism dan Tax Avoidance

Machiavellianism dan *tax avoidance* sebenarnya sama sama perbuatan yang cenderung ke arah negatif. Hal tersebut memperkuat argumen bahwa *machiavellianism* dan *tax avoidance* memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dengan korelasi positif dimana wajib pajak yang melakukan *tax avoidance* cenderung memiliki finansial dan kekuasaan yang kuat. Hal tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu.

Shaffer dan Simmon (2006) di dalam penelitiannya, mendapatkan hasil bahwa adanya tingkat signifikansi yang tinggi ketika seorang konsultan pajak yang memiliki sikap *machiavellianism* yang rendah maka cenderung tidak melakukan *tax avoidance*, penelitian tersebut diperkuat dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghosh and Crain (1995). *Machiavellianism* dan etika memiliki tingkat signifikansi yang tinggi untuk menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak (Ghosh dan Crain, 1995).

Dalam bidang *marketing*, Rosh dan Robertson (2000) melakukan penelitian terhadap para kalangan *marketing* yang profesional, didapatkan hasil bahwa para *marketing* yang memiliki sikap *machiavellianism* yang tinggi cenderung untuk berbohong dan berusaha bekerja sama dengan konsumen agar mendapatkan keuntungan pribadi. Hasil tersebut, tentunya juga memperkuat penelitian sebelumnya dilakukan oleh Singhapakdi dan Vitel (1991) dimana mereka mengemukakan bahwa *marketing* yang memiliki sikap *machiavellianism* yang tinggi cenderung kurang memiliki norma *deontological*.

Dimana *deontological* pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dengan mengartikan terhadap perilaku etika yang menyatakan bahwa perbuatan yang baik berdasarkan dari kehendak diri sendiri dan mutlak berdasar pada kesadaran diri sendiri bukan berdasar intervensi dari pihak lain maupun faktor lainnya meliputi harta, kekuasaan dan intelegensi. Sehingga dalam

melakukan suatu perbuatan maka memiliki alasan yang *universal* atau dapat dikatakan “tanpa syarat”.

Hal tersebut juga berlaku untuk layanan servis dan garansi terhadap suatu produk dimana sangat rawan kecurangan ketika penjual memiliki sikap *machiavellianism* yang tinggi maka akan merugikan konsumen (Wish dan Kum, 2004). Pada akhirnya *machiavellianism* juga akan mengancam mengenai hak atas intelektualitas dan privasi dari orang lain (Winter, dkk, 2004)

Penelitian tersebut juga sedikit mendapatkan modifikasi dari Ang dan Leong (2000) yang menemukan hubungan yang negatif antara PRESOR dengan *Machiavellianism* dalam studi yang dilakukannya di Hongkong. Sehingga dari teori tersebut, maka peneliti membuat hipotesis dengan pengukuran *machiavellianism*:

H1 : Apakah konsultan pajak dan wajib pajak dengan *machiavellianism* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* ?

Hubungan Social Responsibility dengan Tax Avoidance

Social responsibility memiliki signifikansi yang tinggi dengan *tax avoidance*, dimana *social responsibility* tidak memiliki aturan yang baku sedangkan pajak memiliki aturan yang jelas dan tertulis. Signifikansi yang tinggi dari *social responsibility* terhadap *tax avoidance*, ditunjukkan ketika seseorang memiliki kesadaran akan *social responsibility* yang tinggi maka hal tersebut juga akan mempengaruhi etika orang tersebut untuk tidak melakukan *tax avoidance*. Argumen tersebut juga didukung dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya,

Dari penelitian dari Shaffer dan Simmons (2006) ditemukan hubungan bahwa adanya tingkat signifikansi yang tinggi ketika seorang konsultan pajak memiliki tanggung jawab sosial maka dia akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ghosh dan Crain (1995) dimana didapatkan hasil bahwa *machiavellianism* dan etika yang menyangkut dengan risiko memiliki tingkat signifikansi yang tinggi dalam menentukan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak.

Untuk menghitung *social responsibility*, peneliti akan menggunakan instrumen yang dinamakan PRESOR dan dimana pertama kali digunakan oleh Singhapakdi Et All pada tahun 1995. PRESOR semakin dikembangkan dan oleh (Axin, 2004), PRESOR dapat digunakan untuk mengukur tanggung jawab sosial. Friedman (1962) dalam Shaffer dan Simmons (2008) mengemukakan *shareholder* cenderung mengejar keuntungan dan membebankan targetnya kepada para *stakeholder* nya sehingga para *stakeholder* cenderung melakukan *aggressive tax* (Doyle, 2014). Sebaliknya, pandangan *stakeholder* lebih berpikir bahwa dalam menjalankan perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sekitar sehingga dapat menunjang profit perusahaan (Shafer dan Simmons, 2008)

Di dalam mengukur tingkat *social responsibility* peneliti membuat hipotesis :

H2 : Apakah konsultan pajak dan wajib pajak dengan *Social Responsibility* yang tinggi akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance* ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dan termasuk dalam penelitian *basic research* karena penelitian ini berfungsi untuk menguji teori dengan hipotesa yang dibuat oleh peneliti. Teknik penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyebar kuisisioner terhadap wajib pajak yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan hasil 200 Kuisisioner.

Dari hasil pengisian kuisisioner maka didapatkan profil sebagai berikut:

	Frekuensi	Persen
Status		
Wajib Pajak	182	91%
Konsultan Pajak	18	9%
Total	200	100%
Jenis Kelamin		
Laki – Laki	129	64,5%
Perempuan	71	35,5%
Total	200	100%

Umur		
20 – 30 Tahun	79	39%
31 – 40 Tahun	44	22%
41 – 50 Tahun	45	22,5%
50 – 60 Tahun	20	10%
61 – 70 Tahun	12	6%
Total	200	100%
Pendidikan Terakhir		
S1	150	75%
S2	41	20,5%
S3	9	4,5%
Total	200	100%
Sertifikasi		
AK/CA	3	1,5%
Belum Ada	183	91,5%
CFP	8	4%
CISA/CIA	2	1%
CMA	4	20%
Total	200	100%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian kriteria *goodness of fit model structural* yang diestimasi dapat terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah analisis terhadap hubungan *structural* model (pengujian hipotesis) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2 sebelumnya. Hubungan antar konstruk dalam hipotesis ditunjukkan oleh nilai *regression weights* (Hair *et al*, 1998 dalam Haryono & Hastjarjo, 2010). Hipotesis yang merepresentasikan pengaruh suatu konstruk terhadap konstruk lain diuji dengan memeriksa apakah koefisien path (*regression weights estimate*) yang menghubungkan kedua konstruk tersebut signifikan.

Untuk menganalisis lebih jelas mengenai tingkat *machiavellianism* dari masing-masing sampel serta kecenderungan dalam melakukan *tax avoidance*

maupun kecenderungan dalam berperilaku yang sesuai etika maupun dalam tanggung jawab sosialnya. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7. *Regression Weights*

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
N2 <--- N1	,193	,089	2,165	,030	par_20
N2 <--- S4	,286	,109	2,630	,009	par_21

Sumber: Data Primer Diolah

Pengaruh wajib pajak dengan *machiavellianism* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance*

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa wajib pajak dengan *machiavellianism* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* terdapat probabilitas sebesar $0,028 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya wajib pajak dengan *machiavellianism* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* diterima.

Hasil tersebut sesuai dengan kajian empiris dari Shaffer dan Simmon (2006) bahwa *machiavellianism* memiliki tingkat signifikansi yang tinggi untuk menentukan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Ghosh dan Crain (1995) dalam penelitian juga menemukan hasil bahwa wajib pajak dengan orientasi yang tinggi lebih mungkin untuk terlibat terhadap ketidak patuhan yang disengaja. Dalam hal ini, peneliti memasukkan *variable tax avoidance* untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hal demikian juga diperkuat pernyataan Singhapakdi dan Vitel (1991) dimana mereka mengemukakan bahwa *marketing* yang memiliki sikap *machiavellianism* yang tinggi cenderung kurang memiliki norma *deontological*. Dimana *deontological* pertama kali dicetuskan oleh Immanuel Kant (1724-1804) dengan mengaitkan terhadap perilaku etika yang menyatakan bahwa perbuatan yang baik berdasarkan dari kehendak diri sendiri dan mutlak berdasarkan pada kesadaran diri sendiri bukan berdasarkan intervensi dari pihak lain maupun faktor lainnya meliputi harta, kekuasaan dan intelegensi. Sehingga dalam melakukan

suatu perbuatan maka memiliki alasan yang universal atau dapat dikatakan “tanpa syarat”.

Wajib pajak yang memiliki *machiavellianism* yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance*, hal ini dapat dilihat dari data (*mean*) bahwa kecenderungan lebih banyak memiliki point 4 yang artinya “setuju” dimana dalam hal ini jika hasil dari masing-masing wajib pajak lebih dari 60 (total skor 100) maka dapat disimpulkan bahwa orang tersebut memiliki sifat *machiavellianism*.

Sesuai dengan Kaisser (1998) bahwa *Machiavellianism* merupakan faktor internal yang menjadi dasar individu dalam mengambil keputusan. Pada hipotesis ini *Machiavellianism* menjadi menarik untuk dibahas karena cenderung dilakukan oleh kalangan menengah ke atas (Inancsi, 2015). Seperti yang dilansir oleh Tempo.co (2016) bahwa masih ada Rp. 11.400 Triliun Uang Indonesia yang masih berada di luar negeri dan menurut Bambang Brodjonegoro, bahwa warga yang menyimpan uangnya di luar negeri didominasi untuk kepentingan “mengemplang” pajak dengan pola *tax haven* di negara tertentu.

Pengaruh wajib pajak dengan *social responsibility* yang tinggi akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa wajib pajak dengan *social responsibility* yang tinggi akan cenderung melakukan *tax avoidance* dimana ditunjukkan dengan probabilitas sebesar $0,034 \leq 0,05$ sehingga maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya wajib pajak dengan *social responsibility* yang tinggi cenderung melakukan *tax avoidance*

Hal ini tidak sejalan dengan kajian empiris dari Shaffer dan Simmons (2006) bahwa ditemukan hubungan bahwa adanya tingkat signifikansi yang tinggi ketika seorang konsultan pajak memiliki tanggung jawab sosial maka dia akan cenderung tidak melakukan *tax avoidance*.

Perbedaan hasil ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik subjek yang diteliti oleh peneliti dengan Shaffer dan Simmons (2006), dimana Hongkong menerapkan kebijakan *tax haven*, sehingga tarif mendekati 0%. Kecenderungan individu yang tinggal di negara *tax havens* lebih terbuka dalam men-*disclosure* informasi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan (Akamah *et al.*, 2016)

karena tarif pajak yang kecil. Selain itu, korupsi menjadi patokan dalam pembayaran negara, menurut Nawaz (2010) dari lembaga *Transparency International* mengenai hubungan Antara kepatuhan pajak dengan korupsi bahwa terdapat korelasi negative dimana ketika korupsi tinggi maka kepatuhan pajak cenderung turun. Hal tersebut tercermin lewat hasil pemeringkatan negara korupsi yang dikeluarkan oleh *Transparency International* tahun 2015, bahwa Hongkong berada di peringkat 18 sedangkan Indonesia berada di peringkat 88 dunia.

Sesuai jurnal dari Jiyun Kang dan Gwendolyn Hustvedt (2013) bahwa salah satu alat ukur *social responsibility* yaitu *behavioral intention* erat sekali hubungannya dengan kepercayaan (*trust*), dimana hal tersebut erat kaitannya dengan transparansi. Sehingga dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa yang diteliti ini bukanlah dalam artian yang sebenarnya atau bukan *pure social responsibility*, melainkan perilaku *social responsibility* yang cenderung dipengaruhi sikap *trust* untuk bidang tertentu, dengan kata lain bahwa kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* merupakan kompensasi atau pelampiasan dari tidak transparannya atau kurang percayanya wajib pajak terhadap pemerintah.

Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian dari (Ghura, 1998) bahwa rendahnya tingkat korupsi akan meningkatkan pendapatan pajak secara signifikan. Hal tersebut juga tercermin di Indonesia, Mantan Dirjen Pajak Fuad Rahmany seperti yang diberitakan oleh Kompas.com mengatakan bahwa masih banyak orang Indonesia yang enggan membayar pajak karena takut uang pajaknya dikorupsi oleh pegawai pajak sendiri. Dengan kata lain individu lebih memilih uang melakukan kegiatan sosial daripada membayar pajak.

IMPLIKASI

Bagi pembuat peraturan, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan strategi dalam membuat dan mengeluarkan peraturan. Terlebih di tahun 2016 ini, pemerintah sedang menjalankan *tax amnesty* lewat UU no 11 tahun 2016. Lewat sosialisasi mengenai pengenalan dan cara kerja *tax amnesty* diharapkan masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran dalam membayar pajak

serta akhirnya membentuk suatu kebiasaan positif dalam membayar pajak serta meyakinkan bahwa uang hasil *tax amensty* tersebut tidak dikorupsi. Salah satu caranya pemerintah bisa membuktikan dengan penggunaan dana tersebut untuk pembangunan.

Bagi teori perilaku diharapkan dengan adanya penelitian ini maka meneliti lebih jauh mengenai dasar yang dijadikan dasar oleh individu dalam membayar pajak dengan melihat aspek secara lebih luas lagi. Dalam artian bahwa perilaku tidak hanya dikaitkan dengan lingkup perusahaan namun juga bisa dikaitkan ke peraturan negara.

Bagi auditor diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka auditor dapat lebih memfokuskan laporan keuangan di pos-pos yang memungkinkan untuk dilakukan *tax avoidance*, dengan mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengetahui tingkat *Machiavellianism* dari klien yang akan dihadapi terkhusus untuk wajib pajak di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dari hasil penelitian masih ditemukan kecenderungan tingkat *Machiavellianism* yang cukup tinggi di kedua wilayah tersebut.

BATASAN DAN SARAN

Sejalan dengan hasil temuan dan keterbatasan yang telah diutarakan di atas, maka saran yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah Diharapkan penelitian selanjutnya mampu mengembangkan subjek dan objek penelitian pada konsultan pajak di Indonesia pada khususnya, guna mengetahui sejauh mana konsultan pajak berperan dalam melakukan *tax avoidance* maupun kecenderungan dalam berperilaku yang sesuai etika maupun dalam tanggung jawab sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abbot, Walter F., R. Joseph Monsen. 1978. "On the Measurement of Corporate Social Responsibility: Self-Reported Disclosures as a Method of Measuring Corporate Social Involvement". *Academy of Management Journal* 1979, Vol.22, No. 3, pp. 501-515.

Abell, Loren,. *Et all.* 2015. "Machiavellianism, emotional manipulation, and

- friendship functions in women friendship”. Elsevier Journal: Personality and Individual Differences 88 (2016) pp. 108-113.
- Ajzen, I. dan Fishbein, M. 1975, *Understanding Attitudes and Predisting Social Behavior*. Prentice-hall, Englewood Cliffs : New Jersey
- Akamah, Herita T. and Hope, Ole-Kristian and Thomas, Wayne B., *Tax Havens and Disclosure Aggregation* (August 6, 2016). Rotman School of Management Working Paper No. 2419573
- Alabede, O James., *et all.* 2011. “Determinants of Tax Compliance Behavior: A Proposed Model For Nigeria”. *EuroJournals : International Research Journal of Finance and Economics Issue 78*.
- Akuntanonline. 2013. “Banyak Kasus Konsultan Pajak Nakal”. 25 Januari 2016. http://akuntanonline.com/show_detail.php?mod=art&id=225&t=%20Banyak%20Kasus,%20%20Konsultan%20Pajak%20%20Nakal&kat=Perpajakan
- Ang, S.H., Leon, S.M. 2000. “Out of the mouths of babes: business ethics and youths in Asia”. *Journal of Business Ethics*, Vol. 28, pp. 129-44.
- Axinn, C.N., *et all.* 2004. “Comparing ethical ideologies across cultures”. *Journal of Business Ethics*, Vol. 54, pp. 103-19.
- Adriana, Padma., *et all.* 2014. “Determinan Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak”. *Jurnal Akutansi*, Vol. 4 : Malang
- Beritasatu.com. 2013. “Putusan Denda Asian Agri Bisa Tingkatkan Kepatuhan Pajak”. 25 Januari 2016. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/90357-putusan-denda-asian-agri-bisa-tingkatkan-kepatuhan-pajak.html>.
- Bono, Joyce E., Timothy A. Judge., 2001. “Relationship of Core Self-Evaluations Traits- Self-Esteem, Generalized Self Efficacy, Locus of Control, and Emotional Stability- With Job Satisfaction and Job performance: A Meta-Analysis”: *Journal of Applied Psychology* 2001, Vol. 86, Np. 1,pp. 80-92.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility. Evolution of a definitional construct. *Business and Society*, 38(3): 268–295.
- Christie, R., & Geis, F. L. 1970. “*Studies in Machiavellianism*”. New York. NY: Academic Press.
- Dahling, J. J., *et all.* 2009. “The development and validation of a new Machiavellianism scale”. *Journal of Management*, 35: 219-257.

- Devinney, T. M. (2013). Taking the 'non' out of 'nonmarket' strategy. *Global Strategy Journal*, 3: 198–203.
- Drory, A., Gluskinos, U. M. 1980. "Machiavellianism and leadership". *Journal of Applied Psychology*, 65: 86-86.
- Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghura, D. (1998). *Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and Corruption*. September 1998
- Ghosh, D, Crain, T.L. 199, "Ethical standards, attitudes toward risk, and intentional noncompliance: an experimental investigation". *Journal of Business Ethics*, Vol. 14, pp. 353-65.
- Ghozali, Imam. dan Fuad. 2005. "SEM, Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program LISREL 8.80". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. dan Fuad. 2008. "Structural Equation Modelling". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2009. "Analisis Multivariable Lanjutan dengan Program SPSS Cetakan IV". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Tujuh*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, et al. 2006. *Multivariate Data Analysis 6th Ed*. New Jersey: Pearson Education
- Hegarty, W.H., Sims, H.P. Jr. 1978. "Some determinants of unethical decision behaviour: an experiment". *Journal of Applied Psychology*, Vol. 63 No. 4, pp. 451-7.
- Hegarty, W.H., Sims, H.P. Jr. 1979. "Organizational philosophy, policies, and objectives related to unethical decision behavior: a laboratory experiment", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 64 No. 3, pp. 331-8.
- Holland, J. L. (1973). *Making vocational choices*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Inancsi, Tamas, *et all*. 2015. "Machiavellianism and Adult Attachment in General Interpersonal Relationships and Close Relationships". *Europe's Journal of*

Psychology.

- Jefriando, Mikael. 2015. "3 Kebijakan Batal, Target Pajak Rp 1.294 T Tak tercapai". 25 Januari 2016. <http://finance.detik.com/read/2015/10/08/205818/3039938/4/3-kebijakan-batal-target-pajak-rp-1294-t-tak-tercapai>.
- Kharismawati, Engge Margareta. 2015. "DJP Penjarakan 3 Penunggak Pajak". 25 Januari 2016. <http://kesehatan.kontan.co.id/news/djp-penjarakan-tiga-penunggak-pajak>.
- Kaisser, Florian G., *et al.* 1999. "Environmental Attitude And Ecological Behaviour". *Idealibrary: Journal of Environmental Psychology* (1999) 19, pp. 1-19.
- Killian, Sheila, Elaine Doyle. 2004. "Tax Aggression Among Tax Professionals: The Case Of South Africa". *Journal Of Accounting, Ethich & Public Policy* Volume 4, No. 3.
- Kruse, L. _1995. "Globale Umweltveränderungen: eine Herausforderung für die Psychologie Global environmental changes: a challenge for psychology". *Psychologische Rundschau* 46, 81-92.
- Kolk, Ans. 2015. "The social responsibility of international business: From Ethics and the environment of CSR and sustainable development". *Elsevier Journal: Journal of World business* 51, pp. 23-24
- Kompas.Co. 2013. "Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak". <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak>
- Ludigdo. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Logue, K. (2006). "Tax law uncertainty and the role of tax insurance". *Va. Tax Review*, Vol. 25 No. 339, p. 364. *Commissioner v. Newman* (1947), 159 F. 2d. 848 (2nd Cir) at 851.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga : Jakarta.
- Marshall, Rex., *et al.* 2005. "Ethical Issues Facing Tax Professionals: A Comparative Survey of Tax Agents and Big 5 Tax Practitioners in Australia". University of North Alabama: FIMARC Working Paper Series.
- Matten, J.Moon and D. Siegeleds, 2008. "A History Corporate Social Responsibility". *The Oxford Handbook Of Corporate Social Responsibility*
- Nawaz, Farzana. 2010. "Exploring the Relationship between Corruption and Tax Revenue". *Transparency International*

- Nienaber, SG . 2010. "Factors that could influence the ethical behavior of tax professionals". University of Pretoria: *Meditari Accountancy Research* Vol. 18 No. 1
- Portney, P. R. (2008). The (not so) new corporate social responsibility: An empirical perspective. *Review of Environmental Economics and Policy*, 2(2): 261–275.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi ke-12*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ross, W.T. Jr, Robertson, D.C. 2000. "Lying: the impact of decision context". *Business Ethics Quarterly*, Vol. 10 No. 2, pp. 409-40.
- Shafer, William E., Richard S. Simmons. 2008. "Social responsibility, Machiavellianism and tax avoidance". *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 21 Iss 5 pp. 695 – 720.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. 2010. *Research Methods for Business, A Skill Building Approach*, Edisi 5, John Wiley and Sons ; England
- Sikka, Prem, Hugh Willmott. 2008. "The Tax Avoidance Industry: Accountancy Firms on the Make". University of Essex; Colchester.
- Singhapakdi, A., *et all*. 2001, "How important are ethics and social responsibility? A multinational study of marketing professionals", *Journal of Marketing*, Vol. 35 Nos 1/2, pp. 133-53.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Salemba empat : Jakarta.
- Sukmawijaya. 2015. "Konsultan Pajak Diminta Tolak Klien Bermasalah". 25 Januari 2016. <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/01/27/087638012/konsultan-pajak-diminta-tolak-klien-bermasalah>
- Susan, Addison, Frank Mueller . 2015. "The dark side of professions: the big four and tax avoidance". *Emerald journal: Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 28 Iss 8 pp. 1263 – 1290
- Stiglitz, Joseph E. 1986. "The General Theory Of Tax Avoidance". National Bureau Of Economic Research: Working Paper no. 1868.
- Tempo.Co. 2016. "RP 11.400 Triliun Uang Indonesia menginap di luar negeri". <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/090759950/rp-11-400-triliun-uang-indonesia-menginap-di-luar-negeri>

- Votaw, D. (1973), "Genius Becomes Rare," In D. Votaw & S. P. Sethi (Eds.). *The corporate dilemma: Traditional values versus contemporary problems*: 11-45. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- Winter, S.J., *et all.* 2004. "Individual differences in the acceptability of unethical information technology practices: the scenario of Machiavellianism and ethical ideology". *Journal of Business Ethics*. Vol. 54 No. 3, pp. 275-301.
- Wirtz, J., Kum, D. 2004. "Consumer cheating on service guarantees". *Academy of Marketing Science Journal*, Vol. 32 No. 2, pp. 159-75.